

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
14/PUU-XI/2013 TENTANG PEMILU SERENTAK DENGAN TUJUAN
MEMPEROLEH KUALITAS PEMILU YANG LEBIH BAIK**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas

Dalam menyelesaikan sarjana strata 1 (S1)

Ilmu Hukum dengan kekhususan

HUKUM TATA NEGARA



Oleh :

BAHARUDDIN AHMADA

201320014

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MURIA KUDUS

2018

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
14/PUU-XI/2013 TENTANG PEMILU SERENTAK DENGAN TUJUAN
MEMPEROLEH KUALITAS PEMILU YANG LEBIH BAIK

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas

Dalam menyelesaikan sarjana strata 1 (S1)

Ilmu Hukum dengan kekhususan

HUKUM TATA NEGARA

Oleh :

BAHARUDDIN AHMADA

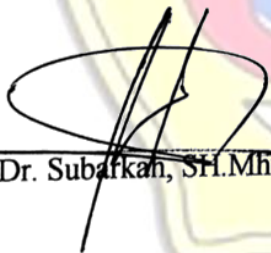
201320014

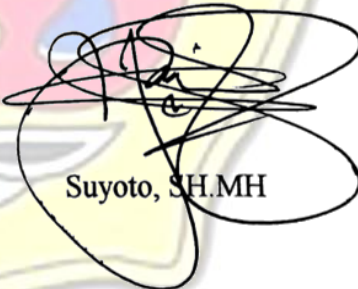
Disetujui :

Kudus,

Pembimbing I


Pembimbing II,


Dr. Subarkah, SH.Mhum


Suyoto, SH.MH

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum UMK


Dr. Sukresno, SH.Mhum

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Baharuddin Ahmada

Nim : 201320014

Alamat : Loram Kulon RT. 08 RW. 01 Kudus

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 14/PUU-XI/2013 TENTANG PEMILU SERENTAK
DENGAN TUJUAN MEMPEROLEH KUALITAS PEMILU
YANG LEBIH BAIK

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa judul skripsi dan bagian bagian yang terdapat dalam isi skripsi ini baik sebagian maupun seluruhnya adalah benar hasil karya sendiri dan pengutipan sumber referensi dilakukan sesuai dengan etika penulisan ilmiah yang berlaku.

Demikian pernyataan diatas saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang tidak sesuai/ berbeda dengan pernyataan diatas maka saya bersedia menerima segala konsekuensinya.

Kudus,

Yang membuat pernyataan

Baharuddin Ahmada

MOTTO

MOTTO :

1. Berbaiklah kepada siapa saja maka orang-orang akan menghargaimu, dengan itu kamu akan bisa berkerja sama dengan siapa saja untuk mencapai kesuksesan.
2. Setiap usaha akan ada hasil, maka berusahalah terus semampu kita selagi kita mampu mencobanya.
3. Bersyukur dengan apa yang kita punya, maka hidup ini akan tenang tidak ada beban dan jangan lupa berdoa kepada Allah SWT supaya kita diberi kemudahan setiap melangkah.
4. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan untuk itu yakinlah bahwa perjuangan tidak akan sia-sia, sikapi dengan rasa syukur dan sabar. Dan hadapi dengan senyuman yang ikhlas.

PERSEMBAHAN

1. Teruntuk kedua Orang Tuaku Tercinta Bapak Noor Khosim dan Ibu Solyati yang tiada henti-hentinya mengasuh dan membimbing saya dengan kasih sayangnya. Serta selalu member doa dan dukungan baik moral maupun materil.
2. Teruntuk keluarga besarku Mbah ngatminah, Bude Sitah, Pak Dhe jujuk dan Adek saya Hilda yang selalu memberikan dukungan semangat.
3. Teruntuk Calonku Shely Habsari yang selalu memberi semangat serta doa dan selalu memberi motivasi nya.
4. Teruntuk Keluargaku Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus Tahun 2013 yang selalu menghiburku dan selalu bertukar informasi disaat mengerjakan Skripsi.
5. Untuk Sahabatku MHFC Nafis, Muamar, Hilmi, Hengki, Azmi, Lutfi dan Deddy serta sahabat-sahabat lainnya terimakasih atas kerjasamanya dan hiburannya.
6. Untuk Almamaterku, Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji Syukur Saya Panjatkan Atas Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayahnya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-IX/2013 Tentang Pemilu Serentak Dengan Tujuan Memperoleh Kualitas Pemilu Yang Lebih Baik”. Skripsi diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Universitas Muria Kudus.

Peneliti menyadari bahwa terselesaikannya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu peneliti dengan segenap kerendahan hati menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, Khususnya kepada :

1. Rektor Universitas Muria Kudus, Dr. Suparno, SH, MS yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menempuh studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muria Kudus.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, Dr. Sukresno, SH, MHum
3. Dosen pembimbing I Dr. Subarkah, SH, Mhum dan Dosen Pembimbing II Bp. Suyoto, SH, MH yang dengan sabar dan tulus serta bersedia meluangkan banyak waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan saran, masukan dan bimbingan kepada peneliti sehingga selesainya penulisan skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu Tercinta yang tiada henti hentinya mengasuh, membimbing saya dengan kasih sayang. Serta memberikan dukungan moral maupun materil sehingga bisa menempuh pendidikan setinggi ini.
5. Semua temen-temenku di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus Angkatan 2013 dan semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi kita semua. Amin...



Kudus,

Peneliti

Baharuddin Ahmada

ABSTRAK

Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang Pemilu Serentak Dengan Tujuan Memperoleh Kualitas Pemilu Yang Lebih Baik. Skripsi Bagian Hukum Tata Negara. Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus. Dosen pembimbing Dr. Subarkah, SH.M.Hum

Dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Pemilahan Serentak yang akan dilaksanakan bersamaan antara Pemilu Nasional dan Daerah. Pemilihan Nasional meliputi Pemilihan Legislatif dan Eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden) sedangkan Pemilu Daerah meliputi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati. Dalam penyelenggaraan Pemilu seringkali menemui beberapa Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini adalah : (1). Bagaimana pertimbangan majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-IX/2013 Tentang Pelaksanaan Pemilu serentak di Indonesia? (2). Apakah akibat Hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomer 14/PUU-IX/2013 Terhadap Kualitas Pemilu?

Dalam Amar Putusan MK Nomor. 14/PUU-XI/2013 Tentang Pemilu Serentak menyatakan mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian Pasal 3 Ayat (5), Pasal 12 Ayat (1) dan (2), Pasal 14 Ayat (2) dan Pasal 112 UU Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat. Dalam Amar Putusan tersebut berlaku untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Pemilu seterusnya.

Paska Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 memiliki dampak yang baik dalam pelaksanaan Pemilu. Namun dengan catatan bahwa PT yang selama ini masih bercokol pada UU Pemilu segera untuk dihapuskan. Keberadaan PT dirasakan akan menodai nilai-nilai demokrasi yang selama ini diperjuangkan oleh bangsa, terlebih lagi, pasca hadirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 seharusnya sudah secara jelas bahwa PT tidak dapat diterapkan pada Pemilu serentak.

Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif Analisis dengan pendekatan Normatif. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan, dokumen-dokumen, Undang-Undang dan Pendapat para ahli. Hasil penelitian tersebut menunjukkan penyelenggaraan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan paling tidak harus memperhatikan tiga pertimbangan pokok, Yaitu antara Sistem Pemilihan dan Pemilihan Sistem Pemerintahan Presidential, Original Intent dari pembentuk UUD 1945. Efektivitas dan Efisiensi penyelenggaraan Pemilihan Umum, serta hak Warga Negara untuk memilih secara Hak Warga Negara untuk memilih secara cerdas.

DAFTAR ISI

Cover.....	i
Halaman Pengesahan	ii
Motto.....	iv
Halaman Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak	vii
Daftar Isi.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
a. Latar Belakang Masalah.....	1
b. Rumusan Masalah	13
c. Tujuan Penelitian	13
d. Kegunaan Penelitian.....	14
e. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
1. Pemilihan Umum	15
1.1 Pengertian Pemilu.....	15
1.2 Regulasi Pemilu.....	20
1.3 Bentuk Pemilu.....	23
2. Negara	23
3. Perihal tentang Demokrasi	27
4. Sistem Presidensial dalam UUD 1945	31
BAB III METODE PENULISAN	
a. Metode Pendekatan	37
b. Spesifikasi Penelitian	39
c. Metode Pengumpulan Data.....	40
d. Metode Pengolahan dan Penyajian Data.....	41
e. Metode Analisis Data.....	41
BAB IV PEMBAHASAN	

1. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.14/PUU-IX/2013 tentang Pelaksanaan Pemilu Serentak di Indonesia.	42
2. Akibat Hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi No.14/PUU-IX/2013 terhadap Kualitas Pemilu.....	64

BAB V PENUTUP

a. Kesimpulan	67
b. Saran.....	68

